



**PUTUSAN**

Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut,

**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Januari 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah transmigrasi di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sei Teras, 18 September 1999, umur 23 tahun, pendidikan SLTP, (dalam pemeliharaan Tergugat);

4. Bahwa sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: a.Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan bahkan Tergugat sampai membawa perempuan tersebut di acara pernikahan keluarga Tergugat; b.Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, dan juga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam dengan alasan jaga malam desa;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Tergugat kembali ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan saling berteleponan, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat, maupun teman-teman Tergugat, namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghoib Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX/2023** yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tanggal 24 Juli 20238.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
10. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah iddah maupun mut'ah, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider; Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.PIh*



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Pengumuman Radio Tuntung Pandang berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 26 Juli 2023 dan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 25 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;

*Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh*



**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Marhani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah transmigrasi di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lebih sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah kami yang cukup berdekatan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering juga Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan bahkan Tergugat sampai membawa perempuan tersebut di acara pernikahan keluarga Tergugat;

*Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh*



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
  - Bahwa penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bersikap cuek dan tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
  - Bahwa saksi tidak tahu, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Marhani;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah transmigrasi di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lebih sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa saksi sering bekunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah kami yang cukup berdekatan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering juga Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main perempuan, dan seringkali membawa perempuan tersebut dalam acara keluarga Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bersikap cuek dan tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 26 Juli 2023 dan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 25 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh*



ãöäú ÌõÚöìó Åöäóì ÍóÇβöãð ãöäú ÍõβøóÇãö  
ÇáúãöÓúáöäöíúäó Ýóáóäú íòìöÈú Ýóãöæó  
ÙóÇáöãñ áÇ Íóβøñ áóãö

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

#### Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

#### Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

#### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan bahkan Tergugat sampai membawa perempuan tersebut di acara pernikahan keluarga Tergugat, selain itu Tergugat sering bersikap cuek dan tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh



dan kehidupan rumah tangganya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 09 Januari 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib) merupakan bukan akta otentik, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan Tergugat telah pergi tanpa diketahui keberadaan dan alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo*, dan bukti tersebut perlu dikuatkan lagi dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2009 yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan bahkan Tergugat sampai membawa perempuan tersebut di acara pernikahan keluarga Tergugat;

Tergugat sering bersikap cuek dan tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; hingga puncaknya terjadi pada tahun 2010 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 09 Januari 1999 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan bahkan Tergugat sampai membawa perempuan tersebut di acara pernikahan keluarga Tergugat, selian itu Tergugat sering bersikap cuek dan tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
3. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

4. Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk bersabar, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*masalah”;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

*Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah**, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Winda Herliana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

**Winda Herliana, S.H.**

*Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp545.000,00</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Plh